



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA

Register No:

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT			
DARI	:	MENTERI DALAM NEGERI				
UNTUK	:	YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA TTK KMA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA TTK				
TEMBUSAN	:	YTH. 1. MENKO BIDANG POLHUKAM TTK KMA 2. MENTERI DALAM NEGERI SBG LAPORAN TTK KMA 3. KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TTK				
KLASIFIKASI	:	SEGERA				
NOMOR	:	019.1/3214/SJ				
REF RDG MENDAGRI NOMOR 019.1/3204/SJ TGL 28 MEI 2021 HAL MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA TGL 1 JUNI 2021 KMA DAN MENINDAKLANJUTI SURAT EDARAN KEPALA BPIP NOMOR 04 TAHUN 2021 TGL 30 MEI 2021 TTG PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2021 DISAMPAIKAN HALS TTK DUA						
AAA	TTK	PELAKSANAAN UPACARA HARI LAHIR PANCASILA YG SEMULA DIPUSATKAN DAN DILAKS MELALUI VIRTUAL REALITY PUKUL 09.45 WIB DIUBAH MJD DILAKS SERENTAK MULAI 07.45 WIB SECARA VIRTUAL KOMBINASI TTK KMA				
BBB	TTK	GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR HADIR BERSAMA JAJARAN FORKOMPIMDA DAN DIWAJIBKAN MELAKUKAN PENDAFTARAN MELALUI bit.ly/harilahpancasila2021 UNTUK MENDAPATKAN AKSES LINK ZOOM MEETING TTK KMA				
CCC	TTK	GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENGHIMBAU SELURUH MASYARAKAT UTK MENGIKUTI UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2021 MELALUI SIARAN LANGSUNG DI KANAL YOUTUBE BPIP KMA LAMAN FACEBOOK BPIP KMA INSTAGRAM BPIP KMA DAN SIARAN TVRI TTK KMA				
DDD	TTK	PESERTA UPACARA MENGGUNAKAN PAKAIAN ADAT KMA TNI GARING POLRI PAKAIAN DINAS UPACARA KURBUK PDU KURTUP III ATAU MENYESUAIKAN TTK KMA				
EEE	TTK	DUM TTK HBS				
Tanggal pembuatan, 31 Mei 2021						
Pengirim	a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL	No.	Waktu		Lalu	Paraf
		Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Nama	Dr. MUHAMMAD HUDORI, M.Si.					
Tanda tangan						





**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Mei 2021

Nomor : Und.045/Ka.BPIP/05/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Undangan Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kepada Yth.:
Bapak/Ibu (Daftar Nama Terlampir)
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala BPIP Nomor. 039/Ka.BPIP/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Undangan Peringatan Hari Lahir Pancasila. Berkenaan hal tersebut bersama ini kami sampaikan perubahan sebagai berikut:

1. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juni 2021 pukul 07.45 WIB secara virtual kombinasi;
2. Peringatan Hari Lahir Pancasila terpusat di Gedung Pancasila dengan susunan acara sebagai berikut :

NO.	JAM	URAIAN KEGIATAN
ACARA PERSIAPAN		
1.	07.45 WIB	Pasukan Siap Menuju Lapangan Upacara
2.	07.46 WIB	Pasukan Upacara Memasuki Lapangan Upacara
3.	07.50 WIB	Komandan Upacara Memasuki Lapangan Upacara
ACARA PENDAHULUAN		
4.	07.56 WIB	Laporan Perwira Upacara
5.	07.57 WIB	Presiden Republik Indonesia Selaku Inspektur Upacara Tiba di Tempat Upacara
6.	07.58 WIB	Salam Kebangsaan
ACARA KEBESARAN		
7.	08.00 WIB	Penghormatan Kebesaran
8.	08.01 WIB	Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara
9.	08.02 WIB	Mengheningkan Cipta Dipimpin Oleh Inspektur Upacara
10.	08.04 WIB	Tanda Kebesaran Buka
11.	08.05 WIB	Pembacaan Teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

12.	08.06 WIB	Tanda Kebesaran Tutup
13.	08.07 WIB	Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
14.	08.10 WIB	Amanat Inspektur Upacara
15.	08.20 WIB	Pembacaan Doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
16.	08.24 WIB	Andhika Bhayangkari
17.	08.25 WIB	Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara
18.	08.26 WIB	Penghormatan Kebesaran
ACARA PENUTUP		
19.	08.27 WIB	Salam Kebangsaan
20.	08.29 WIB	Inspektur Upacara Meninggalkan Tempat Upacara
21.	08.30 WIB	Laporan Perwira Upacara Kepada Inspektur Upacara
22.	08.33 WIB	Komandan Upacara Membubarkan Pasukan
23.	08.35 WIB	Upacara Selesai

3. Peserta Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila menggunakan pakaian:
 - a. Pria : Pakaian Adat
 - b. Wanita : Pakaian Adat
 - c. TNI/POLRI : Pakaian Dinas Upacara (PDU) III atau menyesuaikan
4. Sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, peserta diwajibkan melakukan pendaftaran melalui bit.ly/harlahpancasila2021 untuk mendapatkan akses *link Zoom meeting*.
5. Peserta Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila diwajibkan untuk menggunakan latar belakang virtual selama pelaksanaan upacara.

Atas perhatian, kehadiran dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.


 Kepala,
 Yudian Wahyudi

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Lampiran

Nomor : Und.045/Ka.BPIP/05/2021

Tanggal : 28 Mei 2021

Perihal : Undangan Peringatan Hari Lahir Pancasila

DAFTAR UNDANGAN

A. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Kelompok DPD RI
3. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat
6. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
7. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat
8. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional
10. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
12. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
13. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
14. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan
15. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
16. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
17. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah
18. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah
19. Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah
20. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
21. Ketua Mahkamah Agung
22. Wakil Ketua Mahkamah Agung
23. Ketua Mahkamah Konstitusi
24. Ketua Komisi Yudisial
25. Gubernur Bank Indonesia

B. Menteri Kabinet Indonesia Maju

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Sekretariat Negara
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Menteri Luar Negeri
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Pertahanan
10. Menteri Keuangan
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Menteri Perindustrian
13. Menteri Perdagangan
14. Menteri Pertanian
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16. Menteri Ketenagakerjaan
17. Menteri Perhubungan
18. Menteri Kelautan dan Perikanan
19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
20. Menteri Kesehatan
21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
22. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
23. Menteri Agama
24. Menteri Sosial
25. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
26. Menteri Komunikasi dan Informatika
27. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
30. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
31. Menteri Badan Usaha Milik Negara
32. Menteri Pemuda dan Olahraga
33. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
35. Jaksa Agung
36. Panglima Tentara Nasional Indonesia
37. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
38. Sekretaris Kabinet

C. Internal Kementerian di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden

1. Kepala Sekretariat Presiden
2. Kepala Kantor Staf Presiden

3. Kepala Sekretariat Wakil Presiden
4. Sekretaris Militer Presiden
5. Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
6. Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Kabinet
7. Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kantor Staf Presiden

D. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
6. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
8. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
9. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla)
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
12. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
14. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
15. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
16. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
17. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
18. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
19. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
20. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
21. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPM)
22. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)
23. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
25. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
26. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
27. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
28. Ketua Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS)
29. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
30. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
31. Kepala Badan Sar Nasional (BASARNAS)
32. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
33. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
34. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
35. Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
36. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
37. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
38. Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
39. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
40. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
41. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

42. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
43. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
44. Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP)
45. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
46. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
47. Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)
48. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
49. Ketua Komisi Hukum Nasional
50. Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
51. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
52. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
53. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
54. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional
55. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
56. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
57. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan
58. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
59. Direktur Utama BPJS Kesehatan
60. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Lainnya

E. Staf Khusus Presiden;

1. Juru Bicara Presiden
2. Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional
3. Staf Khusus Bidang Informasi/*Public Relation*
4. Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik
5. Staf Khusus Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
6. Staf Khusus Bidang Komunikasi Sosial
7. Staf Khusus Bidang Pangan dan Energi
8. Staf Khusus Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah
9. Staf Khusus Bidang Perubahan Iklim
10. Staf Khusus Bidang Publikasi dan Dokumentasi
11. Staf Khusus Bidang Bantuan Sosial dan Bencana
12. Para Staf Khusus Milenial

F. Kepala Staf Angkatan;

1. Kepala Staf Angkatan Darat
2. Kepala Staf Angkatan Laut
3. Kepala Staf Angkatan Udara

G. Pimpinan Daerah Seluruh Indonesia

1. Gubernur
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
3. Bupati/Walikota
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota



Kepala,

Yudian Wahyudi



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2021

1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 1945 telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila, maka segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia berkomitmen untuk memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sebagai bagian dari pengarusutamaan Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen bersama segenap bangsa, negara dan masyarakat Indonesia dalam memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kedaruratan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, maka peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 dilaksanakan Upacara Bendera secara virtual kombinasi.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 di tingkat pusat dan daerah serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam masa pandemi COVID-19.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan peringatan Hari Lahir Pancasila dalam masa Pandemi COVID-19 yang tertib dan aman.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pedoman pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 dalam masa pandemi COVID-19 di tingkat pusat dan daerah serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

4. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021
 - a. Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 dilaksanakan serentak mulai pukul 07.45 WIB secara virtual kombinasi, yang dihadiri secara daring (*online*) oleh pimpinan lembaga tinggi negara, lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan para tokoh, dengan susunan acara sebagai berikut:

NO.	JAM	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
ACARA PERSIAPAN			
1.	07.45 WIB	Pasukan Siap Menuju Lapangan Upacara	Gedung Pancasila
2.	07.46 WIB	Pasukan Upacara Memasuki Lapangan Upacara	
3.	07.50 WIB	Komandan Upacara Memasuki Lapangan Upacara	
ACARA PENDAHULUAN			
4.	07.56 WIB	Laporan Perwira Upacara	Istana Bogor
5.	07.57 WIB	Presiden Republik Indonesia Selaku Inspektur Upacara Tiba di Tempat Upacara	
6.	07.58 WIB	Salam Kebangsaan	Virtual Kombinasi
ACARA KEBESARAN			
7.	08.00 WIB	Penghormatan Kebesaran	Virtual Kombinasi
8.	08.01 WIB	Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara	Virtual Kombinasi
9.	08.02 WIB	Mengheningkan Cipta Dipimpin Oleh Inspektur Upacara	Virtual Kombinasi
10.	08.04 WIB	Tanda Kebesaran Buka	Virtual Kombinasi
11.	08.05 WIB	Pembacaan Teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)	Gedung MPR RI

12.	08.06 WIB	Tanda Kebesaran Tutup	Virtual Kombinasi
13.	08.07 WIB	Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	Kediaman Ketua DPR RI
14.	08.10 WIB	Amanat Inspektur Upacara	Istana Bogor
15.	08.20 WIB	Pembacaan Doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Gedung Pancasila
16.	08.24 WIB	Andhika Bhayangkari	Gedung Pancasila
17.	08.25 WIB	Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara	Gedung Pancasila
18.	08.26 WIB	Penghormatan Kebesaran	Virtual Kombinasi
ACARA PENUTUP			
19.	08.27 WIB	Salam Kebangsaan	Virtual Kombinasi
20.	08.29 WIB	Inspektur Upacara Meninggalkan Tempat Upacara	Istana Bogor
21.	08.30 WIB	Laporan Perwira Upacara Kepada Inspektur Upacara	Istana Bogor
22.	08.33 WIB	Komandan Upacara Membubarkan Pasukan	Gedung Pancasila
23.	08.35 WIB	Upacara Selesai	Gedung Pancasila

- b. Peserta Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 menggunakan pakaian:
1. Pria, pakaian adat;
 2. Wanita, pakaian adat; dan
 3. TNI/POLRI, menyesuaikan.
- c. Seluruh warga negara Indonesia untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 melalui siaran langsung di kanal *Youtube* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, laman *Facebook* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Instagram* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan siaran TVRI dari kantor/ruang kerja/rumah/tempat tinggal masing-masing dengan tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19.
- d. Seluruh perkantoran dan seluruh komponen masyarakat Indonesia mengibarkan Bendera Merah Putih selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 Juni 2021.
- e. Tema, Logo, dan Latar Belakang Virtual Hari Lahir Pancasila Tahun 2021:
- 1) Tema Peringatan adalah “Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia Tangguh”.
 - 2) Logo Peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- 3) Latar Belakang Virtual yang digunakan dalam upacara secara daring sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- f. Setiap lembaga tinggi negara, lembaga negara, kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Bank Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, universitas, dan sekolah serta masyarakat turut memeriahkan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan tema, logo, dan latar belakang virtual Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- g. Setiap lembaga tinggi negara, lembaga negara, kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Bank Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, universitas, dan sekolah serta masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan/aktivitas Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak atau massa pada suatu lokasi.
6. Aktivitas/kegiatan alternatif untuk memeriahkan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 dapat dilakukan secara kreatif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
7. Penutup
Demikian pedoman Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 ini, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2021
Kepala,



Yudian Wahyudi

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

TAHUN 2021

LOGO PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2021

PANCASILA DALAM TINDAKAN

BERSATU UNTUK INDONESIA TANGGUH



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2021,
Kepala



Adian Wahyudi

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

TAHUN 2021

LATAR BELAKANG VIRTUAL PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

TAHUN 2021



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2021

Kepala,



Yudian Wahyudi